

Penyelundupan
28

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAYOR JENDERAL SUTOYO-CILILITAN
JAKARTA TIMUR

SUMBER : *Kompas* HARI/TGL: *Senin 26/2004* HLM./KOL: *XIV/35* KODE:
SUBJEK

Penyelundupan di Kalbar Tetap Marak Pemprov Kalbar Akui Tak Berdaya

PONTIANAK, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengaku tidak berdaya mengatasi penyelundupan berbagai komoditas di perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia. Selain banyak pihak yang terlibat, modus operandi penyelundupan itu kini juga semakin beragam, termasuk yang dilengkapi dengan dokumen resmi tetapi palsu.

sama dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau akan membentuk unit badan pengelola sendiri dan memungut retribusi kepada setiap orang yang masuk wilayah Indonesia di Kalbar. Melalui retribusi ini, kawasan perbatasan akan ditata ulang, baik dari segi keamanan, kebersihan, maupun pelayanannya.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Kalbar LH Kadir kepada wartawan di Pontianak, Sabtu (24/7).

"Saya sudah sampaikan masalah ini kepada Presiden Megawati Soekarnoputri yang berkunjung ke Kalbar. Daerah tidak mungkin berjalan sendiri. Pemerintah pusat harus serius menangani penyelundupan ini, baik yang dari Indonesia maupun yang ke Malaysia, atau sebaliknya," kata LH Kadir.

Menurut Wagub Kalbar, salah satu penyebab aktivitas penyelundupan di kedua wilayah itu tetap marak antara lain tidak dipatuhinya kesepakatan kerja sama antarkedua negara berkaitan dengan komoditas apa saja yang boleh dan tidak boleh diperdagangkan. "Khusus menyangkut pengelolaan perbatasan, kelemahan yang paling tampak adalah buruknya pengelolaan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong," ujarnya.

Buruknya pengelolaan di Entikong antara lain karena tidak ada badan yang secara khusus

mengelola kawasan perbatasan itu, yakni kawasan khusus bandara atau pelabuhan. Padahal, dari statusnya, PPLB Entikong tak beda dengan Kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, yang menjadi pintu masuk dan keluar menuju negara lain.

"Hampir semua fasilitas di PPLB Entikong merupakan aset Pemprov Kalbar. Namun, kawasan ini justru sangat minim mendapat perhatian pemerintah pusat," tutur LH Kadir.

Bentuk badan baru

Hal senada diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar I Nyoman Sudana. Menurut Nyoman, setiap tahun Pemprov Kalbar mengeluarkan dana sekitar Rp 800 juta untuk biaya operasional pengelolaan kawasan perbatasan di Entikong. Akan tetapi, hasilnya bukannya bertambah baik, tetapi sekarang malah bertambah semrawut.

Oleh karena itu, lanjut Nyoman, Pemprov Kalbar bersama-

"Pemprov Kalbar sangat dirugikan karena selama ini PPLB Entikong tidak dikelola secara baik oleh pemerintah pusat, seperti pengelolaan pelabuhan udara atau pelabuhan laut. Padahal, pemasukan uang negara dari sini, seperti pajak ekspor maupun bea masuk impor, sangat besar setiap tahunnya. Lalu lintas orang yang melakukan perjalanan dari dan ke luar negeri melalui PPLB setiap bulannya lebih dari 1.000 orang," katanya.

Nyoman mengungkapkan, sesuai dengan kesepakatan kerja sama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo), pembukaan pintu di sepanjang perbatasan Kalbar-Sarawak, selain di PPLB Entikong, kini juga dilakukan di Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. PPLB kedua ini direncanakan akan beroperasi tahun 2006.

Pembangunan PPLB Nanga Badau yang dilakukan sejak tahun 2001 sudah menghabiskan dana lebih dari Rp 7 miliar, yang semuanya berasal dari APBD Kalbar. (FUL)